

Abstrak

Wabah COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan perolehan pendapatan masyarakat yang berdampak pada para debitur dalam melunasi utangnya kepada negara. Adapun Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan program keringanan utang (PMK Nomor 15/PMK.06/2021) yaitu pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* sebagai maksud mempercepat penyelesaian pengurusan piutang negara dan memperingan penanggung utang di masa pandemi COVID-19. Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* pada KPKNL Denpasar. Karya Tulis Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dokumen yang digunakan adalah BKPN dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar. Bagaimana tingkat penyelesaian pengurusan piutang negara pada KPKNL Denpasar menunjukkan hasil yang cukup baik dengan Indeks Kinerja Utama (IKU) pengurusan piutang negara yang mampu memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi presentase penurunan outstanding piutang negara, nilai manfaat ekonomi dari pengelolaan kekayaan negara, presentase efektifitas penyelesaian BKPN, presentase piutang negara yang dapat diselesaikan, dan akurasi basis data dari piutang negara.

Kata kunci: Piutang Negara, *Crash Program*, Tingkat Pengurusan

Abstract

The COVID-19 outbreak has caused a decrease in people's income which has an impact on debtors in paying off their debts to the state. The Minister of Finance issued a debt relief program policy (PMK Number 15/PMK.06/2021), namely the management of state receivables with a crash program as a means of accelerating the settlement of state receivables management and easing debt insurers during the COVID-19 pandemic. This Final Project aims to analyze how the process of managing state receivables with a crash program at KPKNL Denpasar. This final project paper uses library research and field research methods. The documents used are BKPN with insurers of individual debt or legal entities/business entities up to the remaining liabilities of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) at KPKNL Denpasar. How the level of completion of the management of state receivables at KPKNL Denpasar shows quite good results with the Main Performance Index (KPI) of managing state receivables that are able to meet the predetermined targets both in terms of the percentage of decline in outstanding state receivables, the value of economic benefits from the management of state assets, the percentage of effectiveness BKPN settlement, percentage of state receivables that can be settled, and database accuracy of state receivables.

Keywords: State Receivables, *Crash Program*, Management Level